

BAB IV

WAJIB MILITER KOREA SELATAN

Sistem wajib militer (*conscription*) adalah sistem yang memberikan kewajiban militer secara paksa kepada warganya untuk tujuan bela negara. Seluruh warga negara yang usianya sesuai dengan ketentuan dalam UU harus mengikuti pemeriksaan fisik dan mental dan melayani sebagai tentara untuk negara sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Secara umum, sistem pelayanan militer terbagi menjadi dua, yaitu sistem wajib militer dan sistem militer sukarela. Pemerintah Korea Selatan sendiri menerapkan sistem wajib militer guna pembelaan pertahanan nasional.

Wajib militer di Korea Selatan telah berlangsung lama menjadi salah satu sistem pertahanan nasional yang paling mendasar di negerinya. Pada 15 Agustus 1948, dengan berdirinya pemerintah pertama yang sah, Korea Selatan menetapkan kebijakan yang mewajibkan warganya sebagai elemen-elemen (tentara) dalam pertahanan nasional di antara UUD yang telah dibuat. Hal ini dapat dilihat dari UUD, pasal 2 butir 39 yang berisi, 'warga laki-laki negara Republic Korea melakukan dinas militer dengan itikad baik seperti yang ditentukan dalam konstitusi dan hukum'. Mereka yang mendaftar tidak boleh dibeda-bedakan dengan alasan ras dan warna kulit. Selain itu, warga negara yang pernah mengalami hukuman penjara lebih dari 6 tahun, mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti dinas militer dan namanya akan dicoret dari kedinasan.

4.1 Sejarah Wajib Militer Korea Selatan

Pada masa kerajaan Joseon Jepang melakukan Aneksasi ke Korea Selatan. Pada abad ke-18 kapitalisme berkembang di Eropa, bisnis-bisnis besar mulai bermunculan. Negara-negara dunia kemudian mulai memperluas daerah jajahan mereka ke wilayah Asia dan Afrika. Pada abad ke-19 kekuatan barat memaksa dinasti Qing Tiongkok dan Jepang untuk membuka pintu mereka namun kerajaan Joseon menolak meskipun banyak mendapatkan ancaman dari luar. Tahun 1875 merupakan tahun dimana Jepang mulai masuk ke Korea Selatan. Kekuatan imperialis termasuk Jepang bersaing untuk menguasai sumber daya Joseon. Pada tahun 1897 Joseon berubah nama menjadi Kekaisaran Korea dan dipaksa untuk melakukan reformasi dan kebijakan terbuka. Saat Jepang meraih kemenangannya melawan dinasti Qing Tiongkok dan Rusia, Jepang segera mengambil alih Joseon. Akhirnya dimulailah masa penjajahan Jepang di Korea Selatan yang dimulai pada tahun 1910-1945.

Pada masa penjajahan Jepang, pasukan Jepang merampas sumber-sumber daya Joseon, rakyat Korea dilarang menggunakan bahasa Korea, bahkan pada tahun 1939 Jepang memaksa bangsa Korea untuk mengganti nama keluarga menjadi nama bergaya Jepang.

Jepang juga mewajib militerkan orang Korea serta menempatkan mereka di medan perang Pasifik. Rakyat Korea saat itu tidak menerima perlakuan Jepang dan akhirnya pemberontakan rakyat Korea terjadi dimana-mana. Pada tahun 1919 para pemimpin Korea melakukan Deklarasi Kemerdekaan Korea dengan mengajak rakyat Korea serta kaum pelajar untuk melakukan protes-protes dengan cara demonstrasi yang berujung pada banyaknya korban meninggal akibat kekerasan yang dilakukan oleh tentara Jepang.

Pada tahun 1945, akhirnya Korea Selatan berhasil menerima kemerdekaannya sebagai hasil dari kekalahan Jepang di Perang Pasifik. Hal ini terbukti dari ditandatanganinya Deklarasi Potsdam pada 26 Juli yang dihadiri oleh AS, USSR, Inggris dan Cina. Deklarasi tersebut memerintahkan Jepang untuk menyerah di perang dunia tersebut. Di saat melemahnya kekuasaan Jepang Uni Soviet memanfaatkan peristiwa tersebut untuk menyebarkan paham komunis di Korea. Namun, AS menyadari ambisi tersebut dan mencegahnya dengan mengadakan pertemuan yang menghasilkan *parallel* ke-38 pada 15 Agustus 1945 (hari kemerdekaan Korea dari Jepang). Pertemuan tersebut berisi mengenai pembagian kekuasaan antara AS dan Uni Soviet. Paralel ke-38 ini menjadi garis demarkasi militer (Military Demarcation Line) antara kedua negara adikuasa saat itu dan mengakibatkan Korea terbagi menjadi dua yaitu Korea Selatan dan Korea Utara (Chang, 2011).

Pada 15 Agustus 1948, Korea Selatan meresmikan dirinya sebagai negara Republik Korea Selatan (ROK) yaitu sebuah negara demokratis. Rhee Syng-man dan Yi Si-Yeong diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Korea Selatan, mereka adalah dua orang pahlawan pejuang kemerdekaan Korea Selatan yang sangat dihormati kala itu. Sebelumnya pada bulan Mei di tahun yang sama Korea Selatan telah melaksanakan pemilu pertamanya yang diawasi oleh PBB untuk memilih 198 anggota Majelis Nasional. Pada tahun yang sama, disusun undang-undang yang berisi mengenai kebebasan, aturan-aturan serta hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat (*Academy of Korean Study*, 2017). Salah satu kewajiban yang terkadung terdapat pada pasal 2 yang menuliskan tentang kewajiban seluruh rakyat Korea untuk ikut membela negara. (*Korean Law*, 2017). Pemerintah mewajibkan warganya untuk menjadi pasukan pembela negara dengan tujuan meningkatkan rasa nasionalisme dan kekuatan militer guna melindungi negara dari ancaman luar karena trauma yang disebabkan oleh penjajahan Jepang dan dari pihak utara yang menjadi ancaman baru mereka.

Pemilu pertama yang dilakukan di wilayah selatan Korea tidak dapat dilakukan di utara Korea atas dasar penolakan dari Uni Soviet. Pada 9 September 1945, Republik Rakyat Demokrasi Korea didirikan sebagai sebuah negara komunis, dan Kim Il-Sung yang telah berperan sebagai pejabat militer Uni Soviet, disumpah sebagai Presiden. Akhirnya Korea

benar-benar terpisah menjadi dua negara dengan ideologi berbeda yaitu ideologi Demokrasi bebas di Selatan dan ideologi komunis di Utara. Dari sinilah kemudian muncul konflik-konflik yang ditimbulkan akibat perbedaan ideologi tersebut. Akhirnya pada 25 Juni 1950 pecahlah perang antar saudara sendirinya yang diawali dengan serangan pertama yang dilancarkan oleh Korea Utara. Korea Utara menyerang dengan dipersenjatai dengan pasukan dan tank-tank buatan Soviet, yang memicu sebuah peperangan. Serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan cukup keras sehingga dalam dua hari, mereka berhasil merebut beberapa kota termasuk kota Kaeseong yaitu kota yang terletak diposisi strategis dan pada hari ketiga berhasil menguasai Ibu Kota Seoul. Serangan tersebut terus berlanjut sampai merebut hampir semua wilayah Korea kecuali Busan yang saat itu menjadi Ibu Kota sementara.

Pada saat peperangan, Korea Utara memiliki bantuan persenjataan dari Uni Soviet. Sedangkan, di Korea Selatan mereka mendapatkan bantuan persenjataan serta pasukan makanan dari Amerika Serikat yang sangat membantu. Namun, menurut Jendral Douglas MacArthur Amerika Serikat tidak memberikan bantuannya secara maksimal, hal ini dikarenakan saat itu pasukan Angkatan Darat kedelapan yang memiliki 4 divisi dalam keadaan lemah saat menjaga perbatasan di Jepang sehingga AS lebih banyak memberikan dukungannya ke Jepang dari pada Korea Selatan saat itu. Tentara Korea Selatan sendiri pada saat itu terbilang lemah. Amerika menilai bahwa kurang dari separuh batalion infantri Korea Selatan memiliki sedikit kesiapan dalam berperang¹.

Bantuan dari Amerika Serikat dan PBB berhasil merebut kembali Seoul sekaligus hampir semua wilayah Korea namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama sebab pihak Cina terancam dari serangan AS dan sekutu yang terus-menerus mengarah pada utara, ikut membantu Korea Utara untuk menyerang balik pasukan PBB pada bulan November tahun 1950, dan dalam waktu yang tidak lama, mereka kembali merebut Seoul. Pasukan PBB kemudian berhasil mengumpulkan kekuatan untuk memukul mundur pasukan-pasukan komunis dan merebut kembali Seoul kembali dan sampai perbatasan paralel ke-38. Pihak PBB tidak ingin skala perang menjadi lebih luas lagi, maka mengadakan perundingan untuk mencari titik penyelesaian perang. Demikian, konflik senjata dan perundingan yang terjadi berulang kali, akhirnya pada perundingan Panmunjeom pada tanggal 12 Juli 1953 menghasilkan status pemberhentian perang untuk sementara di antara Korea Selatan dan Korea Utara dan antara pihak sekutu dan AS dengan Uni Soviet dan Cina. Perang selama tiga

¹ <https://www.britannica.com/event/Korean-War>

tahun tersebut mengakibatkan korban jiwa sebanyak 180.000 jiwa dari Korea Selatan termasuk pasukan-pasukan dari PBB dan kehancuran yang meliputi semua aspek termasuk, politik, ekonomi, keamanan, bahkan harapan untuk hidup.

Presiden Rhee Syng-man memperkuat pemerintahan otoriterinya pada tahun 1960-an saat itu partai liberal yang sedang berkuasa mencurangi pemilu presiden. Para pelajar muda yang melakukan protes di jalan-jalan ditembak oleh polisi, kemudian presiden Rhee mengumumkan pengunduran dirinya dan mengungsi ke Hawaii pada tahun yang sama. Tak lama setelahnya konstitusi diubah, dan sistem kabinet dan Majelis Nasional Bikameral diadopsi. Perdana Menteri Jang Myeon menjadi Presiden sementara Korea Selatan. Tetapi situasi politik menjadi sangat rentan di tengah protes para pelajar Korea Selatan yang masih terus berlangsung. Pada Mei 1961, sebuah kelompok pejabat militer muda yang dipimpin oleh Jendral Park Chung-hee merebut kekuasaan melalui kudeta, ia menganggap pemerintahan yang dikuasai oleh partai liberal yang sebelumnya adalah pemerintahan yang gagal, dan yang membawa kondisi anarki. Dalam pemilu presiden yang diadakan pada bulan Oktober 1963, setelah dua tahun kekuasaan militer, Park Chung-hee dipilih sebagai presiden setelah pensiun dari militer dan dilantik pada bulan Desember ditahun yang sama.

Setelah Park menjabat atas nama sistem 'Yushin' (*Restricted System*), ia menaruh semua aspek seperti politik, ekonomi, dan sosial di dalam komando militernya (Kim, 2009) sebagai mantan tentara presiden Park sangat bersemangat untuk membentuk stabilitas negara, meningkatkan kualitas militer dan ekonomi. Ia yakin bahwa untuk menciptakan stabilitas negara, harus membatasi kebebasan sipil dan kebebasan pers. Dengan demikian sistem demokrasi ala presiden Park mendorong kestabilan dan mengembangkan situasi dan kondisi negara. Pada masa penjajahan Jepang, kewajiban menjalankan dinas militer untuk masyarakat Korea Selatan sebenarnya sudah diberlakukan. Namun, sistem tersebut masih diatur oleh pemerintah Jepang. Masyarakat yang mengikuti wajib militer, mereka diperlakukan sangat keras, sehingga banyak sekali pemuda Korea yang mencoba menghindari dari wajib militer pada masa itu. Keadaan demikian, juga tidak berubah pada masa pemerintahan Rhee Syng-man, wajib militer menerima banyak perlawanan pada saat itu. Banyak pemuda Korea Selatan yang mencoba menghindari atau lari dari kewajiban dinas militer. Menurut data Kementerian Pertahanan Republik Korea, Pada tahun 1960 tingkat pemuda yang lari dari kewajiban dinas militernya mencapai 35%, banyak alasan dari larinya para pemuda ini dari kewajiban mereka, misalnya karena ketakutan terhadap budaya kekerasan di dalam kamp militer, ideologi agama minoritas yang dianut saat itu ataupun karena mereka tidak ingin melaksanakan wajib militer saat itu.

Terlepas dari masalah-masalah sistem wajib militer tersebut, kemudian munculah Rezim baru, yaitu masa pemerintahan Park Chung-hee (1961-1979). Rezim yang dibawa oleh Presiden Park ini berhasil mendapatkan penerimaan wajib militer secara efektif melalui kebijakan wajib militer yang agresif dan indoktrinasi rakyat melalui sekolah dan media masa dengan gagasan bahwa keamanan militer sangat penting dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara. Pada tahun 1961 tanggal 9 Juni belum sampai satu bulan setelah kudeta yang dilakukan oleh Park Chung-hee, beliau memberikan batas waktu kepada orang-orang yang belum melaksanakan wajib militer, dalam sepuluh hari, lebih dari 240.000 orang melaporkan diri mereka. Dengan penambahan jumlah tentara, Presiden Park kemudian memperkuat dasar armada militernya. Untuk memiliterisasi seluruh masyarakat (laki-laki warga negara Korea Selatan), beliau membuat tujuan sosial dimana menjadikan tingkat peserta wajib militer menjadi 100%, tidak ada lagi peserta wajib militer yang melarikan diri tanpa alasan. Beliau melakukan upaya-upaya untuk memperketat sistem wajib militer, dimana, beliau mengontrol seluruh tingkat masyarakat dan memberikan hukuman yang berat untuk mereka yang melarikan diri dari wajib militer serta memberikan sanksi sosial, dimana orang-orang tersebut yang lari dari wajib militer diberikan tanda khusus pada identitas mereka sehingga mereka sulit untuk mendapat pekerjaan.

Dalam prosesnya untuk memperketat sistem wajib militer pada masa pemerintahan presiden Park, masalah yang paling bertentangan adalah ketiadaan peraturan yang dapat mengawasi dan mengontrol setiap individu calon peserta wajib militer, sehingga pada masa itu dibuatlah kebijakan mengenai pendaftaran warga sipil untuk memasukkan dinas wajib militer. Kontrol tersebut dilakukan melalui pasar pekerja, dimana seseorang yang belum mengikuti wajib militer maka mereka dianggap ilegal dalam mencari pekerjaan. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat memperketat sistem wajib militer. Hal ini terbukti pada penurunan tingkat individu yang lari dari kewajiban dinas militer, dimana pada pemerintahan Presiden Park di tahun 1968 presentase individu yang lari dari kewajiban dinas militer turun hingga 13%, tahun 1971 menurun sampai 7.85%, dan pada tahun 1972 menurun sampai 4.4% setelah tahun 1974 penurunan tersebut sangat signifikan hingga 0.1%. Untuk mensukseskan tujuan 100% peserta sipil wajib militer, Presiden Park memperketat hukuman bagi orang-orang yang lari dari dinas wajib militer. Pada tahun 1958 sebelum terjadinya kudeta hukuman untuk para individu yang lari dari dinas militer hanya 6-12 bulan saja kemudian pada masa pemerintahan Presiden Park kebijakan mengenai hukuman tersebut diperketat lebih dari satu tahun, hukumannya bisa sampai 10 tahun penjara. (Rim, 2010)

Banyak demonstrasi yang berlangsung akibat kediktatoran Presiden Park. Kemudian, pada Oktober 1979 Presiden Park dibunuh dan muncullah sebuah kelompok pejabat militer baru yang dipimpin oleh Jendral Chun Doo-Hwan (*Singunbu*) merebut kekuasaan melalui kudeta. *Singunbu* menekan suara-suara yang meminta demokratisasi, termasuk gerakan demokratisasi May 18, secara paksa. Chun Doo-Hwan disumpah sebagai Presiden dan pemimpin dengan cara yang otoriter. Pemerintahan Chun Doo-Hwan berkonsentrasi pada stabilitas ekonomi, dengan sukses mengendalikan inflansi harga. Pada Juni tahun 1987, Roh Tae-Woo, calon presiden dari partai yang berkuasa menerima permintaan rakyat untuk melakukan pemilu secara langsung. Kemudian, pada tahun 1988 Roh Tae-Woo diangkat menjadi Presiden selama 5 tahun. Pada kedua pemerintahan tersebut, sama-sama merupakan pemerintah yang diktator sehingga banyak pemuda-pemuda yang melakukan demonstrasi. Namun, tidak ada satupun yang dapat menolak dinas wajib militer saat itu. Hal tersebut membuktikan betapa kuatnya militerisme di masyarakat saat itu.

Setelah adanya pemilihan presiden melalui pemilu yang dilakukan oleh masyarakat Korea pada masa pemerintahan Roh Tae-Woo. Isu wajib militer menjadi isu yang penting untuk kampanye, dimana para calon menggunakan isu tersebut untuk mendapatkan suara para pemuda Korea Selatan, misalnya tentang pengurangan masa dinas wajib militer. Sejak masa pemilihan presiden Roh Tae-Woo masa wajib militer telah turun sampai 24 bulan dimasa pemerintahan Roh Moo-Hyun, kemudian pada masa akhir jabatannya beliau merancang penurunan wajib militer hingga 18 bulan. namun, karena masalah keamanan Korea Selatan akhirnya mereka berdiskusi dan mencapai akhir bahwa masa wajib militer menjadi 21 bulan.

Bahasan mengenai pengurangan masa wajib militer ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1950-an. Pada awalnya masa wajib militer mencapai 36 bulan untuk semua bidang kemudian berkurang menjadi 33 bulan untuk angkatan darat pada tahun 1959, pada tahun 1962 hanya angkatan darat saja yang mengurangi hingga 30, kemudian pada tahun 1968 terjadi seranga pada gedung Pemerintahan Korea Selatan (*Blue House*) pada tanggal 21 Januari sehingga menambahkan masa wajib militer dimana pada Angkatan Darat mereka menaikkan masa wajib militernya menjadi 36 bulan dan tambahan 3 bulan pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut menjadi 39 bulan. pada tahun 1977 masa wajib militer untuk angkatan darat menurun menjadi 33 bulan yang lainnya tetap pada 39 bulan, pada tahun 1979 angkatan laut dan angkatan udara menurunkan masa wajib militernya menjadi 35 bulan. pada tahun 1981 angkatan darat saja menurunkan masa wajib militernya menjadi 30 bulan, pada tahun 1993 terjadi perubahan undang-undang wajib militer. Angkatan darat menurunkan masa wajib militernya menjadi 26 bulan lalu angkatan laut dan angkatan udara menjadi 30 bulan.

pada tahun 1994 dengan alasan kekurangan pasukan tentara laut saja yang menurun sampai 28 bulan hal ini dilakukan untuk menarik minat peserta wajib militer. Pada tahun 2003 terjadi perubahan undang-undang wajib militer seluruh angkatan wamil mengurangi masa wajib militernya selama dua bulan. Pada tahun 2004 dikarenakan alasan kekurangan pasukan tentara udara, angkatan udara mengurangi masa wajib militernya menjadi 27 bulan pengurangan masa wajib militer yang terakhir terjadi pada tahun 2011 angkatan darat menjadi 21 bulan, angkatan laut menjadi 23 bulan dan angkatan udara menjadi 24 bulan.² Wajib militer Korea Selatan ini tetap berlaku sampai saat ini setidaknya ada tiga faktor yang mendorong wajib militer terus dibertahankan sampai saat ini antara lain yaitu, Ekonomi, Politik keamanan dan sosial budaya.

4.1.1 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong sistem wajib militer menjadi salah satu sistem yang dipilih oleh Korea Selatan untuk mempertahankan Keamanan Korea Selatan. Setelah penjajahan dan perang saudara yang terjadi di Korea Selatan perekonomian Korea mengalami pasang surut. Perang yang berlangsung selama 3 tahun ini melibatkan banyak korban jiwa dan kerugian material sehingga Korea Selatan jatuh dalam jurang kemiskinan. Perang tersebut membawa instabilitas yang sangat luar biasa, *income per capita* Korea mengalami penurunan, pada tahun 1950 *income per capita* Korea sebesar USD 876.00 turun menjadi USD 804.00. Pertumbuhan ekonomi saat itu relatif lambat, sehingga Korea banyak mendapat bantuan luar negeri untuk membangun negaranya, salah satu negara yang memberikan bantuan saat itu adalah Amerika Serikat.

Paska perang Korea Selatan juga membutuhkan armada perang yang memadai untuk terus mempertahankan keamanan negaranya. Sistem wajib militer bisa menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk sistem pertahanan Korea Selatan saat itu. Karena sistem wajib militer sebenarnya memiliki banyak keuntungan. Presiden asosiasi pengacara Hwang Sun-Chul di Jeonbuk menjelaskan bahwa kepentingan pemberlakuan sistem wajib militer bagi pemerintah sebenarnya dapat dilihat dari beberapa fungsi yang baik, salah satunya yaitu dapat menyimpan cadangan tentara yang aktif dan ketika ada kegaduhan militer, dapat dipakai secara intensif, serta dapat mempertahankan prajurit-prajurit yang nantinya menjadi kekuatan militer dengan dana yang lebih sedikit dibanding sistem yang harus membayar upah atau gaji

² Diakses melalui <http://m.futurekorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=36184> pada tanggal 1 Mei 2017, pukul 07.55 WIB

untuk prajurit. Mengingat Korea Selatan saat itu merupakan negara miskin setelah penderitaan yang dialami berturut-turut lewat penjajahan serta perang saudara.

4.1.2 Faktor Politik Keamanan

Wajib militer di Korea Selatan telah berlangsung lama menjadi salah satu sistem pertahanan nasional yang paling mendasar di negerinya. Pada 15 Agustus 1948, dengan berdirinya pemerintahan pertama yang sah, Korea Selatan menetapkan kebijakan yang mewajibkan warganya sebagai elemen-elemen (tentara) dalam pertahanan nasional di antara UUD yang telah dibuat. Sistem perpolitikan pada masa-masa paska penjajahan masih belum stabil. Ditengah ketidakstabilan Korea Selatan Pasca penjajahan yang dialami. Pada tahun 1950 terjadi perang saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara selama tiga tahun. Pada tahun 1953 perang yang terjadi antara Korea Selatan dan Utara telah dinyatakan berakhir. Namun sebenarnya masih sering terjadi konflik antara kedua negara perundingan sering sekali dilakukan oleh kedua negara, namun tidak pernah berakhir baik. Sehingga kedua negara masih menganggap masing-masing negara merupakan ancaman. Oleh karena itu, Korea Selatan mempertahankan sistem wajib militernya sebagai alat pertahanan Korea Selatan sampai saat ini.

Sistem perekrutan tentara Korea merupakan sistem yang harus ada untuk mendampingi keamanan masyarakat Korea. Sistem perekrutan militer ini merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam Undang-Undang dasar negara. kepentingan pemberlakuan wajib militer bagi pemerintah dapat dilihat dari beberapa fungsi yang baik bagi negara dan elemen-elemen, yaitu dapat meningkatkan nasionalisme kepada peserta-peserta wajib militer dan dapat memenuhi kebutuhan kekuatan militer baik secara kualitas maupun kuantitas.

4.1.3 Nasionalisme Bangsa Korea

Menurut Cahavan 1979, “Nasionalisme merupakan suatu perpaduan antara perasaan perasaan emosional berlebih dari dua fenomena, yakni kebangsaan dan patriotisme.” Kebangsaan merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan bahasa, kesamaan sejarah di masa lalu dan memiliki anggapan yang sama mengenai kebudayaan yang sama. sedangkan patriotisme adalah kecintaan terhadap tanah air dan merupakan awal dari kebangsaan.

Bangsa Korea memiliki sifat yang khas yaitu, tulus hati, peka dan gigih. Nasionalisme bangsa Korea sejak kolonialisasi yang dilakukan Jepang. Sebenarnya perasaan nasionalisme

yang dimiliki oleh bangsa Korea sudah ada sejak zaman kerajaan Joseon, namun nasionalisme ini sebenarnya ada hanya untuk menyatukan masyarakat Joseon kala itu. Pada masa kolonialisme Jepang bangsa Korea mendapatkan pendidikan universal, semua masyarakat Korea mulai mendapat pendidikan yang rata. Dari sanalah, masyarakat Korea memiliki ciri khusus yang membedakan mereka dengan orang Jepang yang menjajah saat itu. Dari sana mereka memiliki perasaan untuk terbebaskan dari penjajahan yang dilakukan orang Jepang saat itu.

Setelah mendapatkan kemerdekaan nasionalisme bangsa Korea mencapai titik yang tinggi, beberapa dari mereka bahkan mencapai titik *supranasionalism*. Namun, saat terjadi perang saudara pada tahun 1950 nasionalisme bangsa Korea mengalami penurunan. Perang Korea yang semakin gencar ini juga melibatkan perang ideologi di dalamnya. Sebelumnya bangsa Korea memiliki kesamaan semangat untuk melawan Jepang, namun saat cara pandang mereka berubah, maka kesamaan tersebut perlahan menurun. Sistem wajib militer yang dicanangkan pemerintah Korea pada masa itu salah satu fungsinya adalah untuk meningkatkan nasionalisme para pesertanya. (Masachi, 2014 : 내셔널리즘의 역설) Sistem ini dapat digunakan untuk menguatkan nasionalisme bangsa Korea Selatan pasca pemisahan Korea.

4.2 Kategori-Kategori Wajib Militer

Laki-laki yang mengikuti wajib militer nantinya akan dibagi kedalam kategori-kategori sebagai berikut:

1. Tentara Aktif

Tentara aktif adalah orang-orang yang masuk untuk melaksanakan wamil karena direkrut maupun melakukannya dengan suka rela dan calon perwira serta bintara yang diseleksi ataupun yang melalui penugasan sesuai hukum yang telah ditetapkan. Masa dinas untuk golongan yang aktif dibagi sebagai berikut:

- Angkatan darat: 1 tahun 9 bulan
- Angkatan laut: 1 tahun 11 bulan (marine : 1 tahun 9 bulan)
- Angkatan udara: 2 tahun

2. Tentara Cadangan

Tentara cadangan adalah orang-orang yang telah menyelesaikan masa dinas militernya dan orang-orang yang telah ditransfer menurut undang-undang militer. Jadi, mereka sebelumnya sudah melakukan tugas mereka untuk melaksanakan wajib

militer dan sudah dikirim kembali kemasyarakat. Namun, jika sewaktu-waktu perang terjadi maka orang-orang tersebut dapat dipanggil kembali untuk menjadi tentara.

3. Tentara Tambahan

Adalah orang-orang yang dinilai memiliki kelayakan untuk menjadi pasukan aktif dalam hal ini, secara fisik maupun mental baik namun, mereka tidak bisa dimasukkan kedalam dinas militer karena kuota yang ada sudah penuh. Selain itu orang-orang dalam bidang Personil dinas sosial masyarakat, personil olahraga dan seni, Dokter kesehatan umum, Dokter khusus wajib militer, Pelayanan publik advokat, Dokter hewan pencegahan epidemik umum, Personil spesialis kajian riset, Personil kecakapan industri.

4. Persiapan Dinas Militer

Orang-orang dalam persiapan dinas militer adalah mereka yang diwajibkan mengikuti dinas militer tetapi, belum masuk dalam golongan aktif, cadangan serta buruh masa perang. Warga negara Korea Selatan yang berjenis kelamin laki-laki dikirim kedalam golongan persiapan dinas militer sejak berusia 18 tahun seperti yang sudah tertera dalam hukum wajib militer yaitu pasal 1 butir 5 no.04. orang-orang yang masuk kedalam golongan persiapan dinas militer dikirim surat pernyataan penugasan kewajiban menjalankan dinas militer melalui jaringan informasi ataupun pos surat oleh direktur urusan daerah.

5. Buruh Masa Perang

Adalah orang-orang yang dinilai tidak dapat mengikuti sebagai pasukan aktif ataupun tambahan, tetapi dinilai dapat menanggung layanan militer dari panggilan buruh masa depan. Selain itu, orang yang ditransfer ke golongan buruh masa perang menurut undang-undang militer ini.

4.3 Tahapan-Tahapan Mengikuti Wajib Militer

Warga negara Korea Selatan yang berjenis kelamin laki-laki pada saat mereka berusia 18 tahun mereka ditransfer dalam golongan persiapan dinas militer. Kemudian saat mereka berumur 19 tahun mereka akan dikirim surat untuk melakukan pemeriksaan fisik dan mental untuk diselidiki apakah seseorang tersebut dapat mengikuti atau tidak dalam waktu dan tempat yang ditentukan. Setelah menjalani pemeriksaan fisik dan mental selanjutnya seseorang tersebut akan menunggu surat pemberitahuan dari Direktur urusan militer daerah yang berisi penugasan kewajiban dinas militer kepada orang yang diwajibkan, menggunakan jaringan informasi ataupun pos surat. Setelah menerima surat pemberitahuan mengenai

kewajiban untuk melaksanakan dinas militer maka seseorang itu wajib hadir untuk melaksanakan dinas militer pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

4.4 Rating Level Fisik dan Mental

Saat melakukan pemeriksaan untuk mengikuti wajib militer, dokter khusus wajib militer ataupun perwira medis memberi rating apakah seseorang tersebut layak atau tidak untuk menjalani dinas militer. Rating ini terdiri dari 7 level, angka level yang semakin kecil menunjukkan bahwa seseorang tersebut sehat dan layak untuk mengikuti dinas militer. Level 1 sampai dengan level 3 mereka layak untuk mengikuti dinas militer dan biasanya akan segera menerima surat panggilan untuk menjalani dinas militer. Saat seseorang tersebut berada di level 4 biasanya mereka dialihkan ke golongan tambahan. Bagi mereka yang berada di level 5, mereka tidak dapat mengikuti dinas militer sebagai yang aktif maupun tambahan tetapi, dapat digolongkan kedalam buruh masa perang. Seseorang yang berada di level 6 adalah mereka yang tidak memiliki gangguan penyakit maupun mental. Seseorang yang berada di level 7, mereka adalah orang-orang yang sulit diperiksa karena ada penyakit ataupun gangguan fisik atau mental. Direktur urusan militer daerah harus memberikan pemeriksaan kembali kepada orang yang mendapat rating level 7.

Direktur urusan militer daerah kemudian menentukan klasifikasi kompetensi yang diperlukan dalam dinas militer sesuai jurusan kualifikasi lisensi bagi yang orang yang masuk dalam rating, level 1 sampai 4 dan masing-masing staf pertahanan militer memberikan bidang yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.